

---

---

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KINERJA  
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Cindy Yudhita Pramita Sari, Hero Priono, Tituk Diah Widayantie

Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email Korespondensi: cindyyudhitapramitasari@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Variabel Independen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Variabel Dependen Kinerja pegawai dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Prov. Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh data tiap bulan pada periode tahun 2015-2018, sedangkan Sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus jenuh dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasi. Metode pengumpulan data dengan meninjau langsung ke instansi tersebut dan dengan metode dokumentasi. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program PLS. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen, variabel dependen dan variabel intervening saling berkaitan meskipun dalam penelitian ini ada yang tidak berpengaruh. Dalam penelitian ini hubungan secara langsung semua variabel saling berpengaruh tetapi pada penelitian ini hubungan secara tidak langsung tidak saling berpengaruh.

**Kata kunci:** Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, kinerja dan pendapatan asli daerah

**PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemahamannya bahwa kebermanfaatannya secara tidak langsung ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kinerja pegawai Badan Pendapatan provinsi Jawa Timur dengan variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah,

Pajak Kendaraan Bermotor dan Restribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan undang-undang No.28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Ada pun penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah, Pajak Cukai Rokok. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh (Agustina & Arliani, 2015) dan (Anggraini et al., 2016) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain penelitian tersebut terdapat (Keuangan et al., 2012) dalam penelitian ini Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja. (ULFA MARIATI, 2015) dalam penelitian ini pungutan pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar

yang bisa bergerak Sektor PKB Provinsi Jawa Timur menyumbang sebesar Rp 6.448.692.325.911 atau mencapai 43% dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (BAPENDA Jatim, 2018).

Saat ini kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan yang memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Azhari Aziz Samudra, 2015) Sektor BBNKB Provinsi Jawa

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
PKB	2015	4.800.000.000.000	4.911.629.132.675	102,33%
	2016	5.000.000.000.000	5.300.947.249.143	106,02%
	2017	5.130.000.000.000	5.889.902.148.435	114,81%
	2018	5.400.000.000.000	6.448.692.325.911	119,42%
BBNKB	2015	3.700.000.000.000	3.534.090.028.065	95,52%
	2016	3.300.000.000.000	3.710.574.601.900	112,44%
	2017	3.480.000.000.000	3.705.349.480.779	106,48%
	2018	3.650.000.000.000	4.089.296.812.767	112,04%
PBBKB	2015	2.200.000.000.000	2.201.522.361.438	100,07%
	2016	1.905.000.000.000	2.000.191.757.347	105,00%
	2017	2.000.000.000.000	2.109.000.178.969	105,45%
	2018	2.220.000.000.000	2.320.286.867.256	104,52%
PAD	2015	12.348.880.000.000	12.563.984.952.643	101,74%
	2016	11.953.700.000.000	12.797.224.049.518	107,06%
	2017	13.001.272.700.000	14.376.301.711.026	110,58%
	2018	13.520.900.000.000	15.088.756.369.732	111,60%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Prov. Jawa Timur

Timur menyumbang sebesar Rp 4.089.296.812.767 atau mencapai 27% dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (BAPENDA Jatim).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur (Pemerintah Daerah, 2010) Tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur (Pemerintah daerah, 2010a) dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu:

- a. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum satu kendaraan bermotor yang pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya; dan
- b. Bobot yang dicerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas

toleransi atau koefisien lebih besar dari 1 (satu) yang berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Untuk kendaraan bermotor dengan usia 25 tahun ke atas dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku. Khusus kendaraan yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor.

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur (Pemerintah Daerah, 2010) Pajak Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

### **Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur (Pemerintah daerah, 2010b) dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJKB) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Menurut Perda Jawa Timur (Pemerintah daerah, 2010c), tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen).
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen).

Sedangkan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

tarif BBNKB ditetapkan masing- masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Besaran pokok pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (Undang-undang republik indonesia, 2004) tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

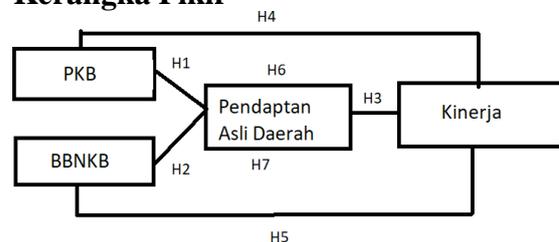
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor yang ada dalam daerah tersebut yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber PAD berasal dari pajak. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan terhadap PAD melalui potensi dan peranan sektor pajak. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut.

### Kinerja

Kinerja merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh seorang pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi

dalam suatu periode tertentu. Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan produktivitas. Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi atau instansi. Kinerja pegawai merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap pegawai mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Menurut (Maryoto, 2000) kinerja pegawai adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Sementara itu (Malayu S.P Hasibuan, 1996) berpendapat kinerja karyawan adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

### Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir  
Sumber : Peneliti

### Hipotesis

Mengacu pada penelitian terdahulu dan landasan teori diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh PKB terhadap pendapatan asli daerah
- H2: Terdapat pengaruh BBNKB terhadap pendapatan asli daerah.
- H3: Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja.
- H4: Terdapat pengaruh PKB terhadap kinerja.
- H5: Terdapat pengaruh BBNKB terhadap kinerja.
- H6: Terdapat pengaruh PKB terhadap kinerja melalui pendapatan asli daerah.
- H7: Terdapat pengaruh BBNKB terhadap kinerja melalui pendapatan

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PKB, BBNKB dan PAD tiap bulan selama periode 2015-2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus jenuh dimana seluruh anggota populasi digunakan semua dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan/ data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas, kantor, instansi atau lembaga terkait. Data dalam ini diambil di Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Partial Least Square*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melakukan penelitian kuantitatif salah satunya adalah dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metoda statistik SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi

berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan multikolonieritas. SEM merupakan suatu metode statistic multivariat yang membantu peneliti untuk menguji teori dan riset empiris yang didukung oleh data (Ghozali, 2014)

Dalam menilai model struktural dengan struktural PLS dapat dilihat dari nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai R-Square merupakan uji goodness fit model. Perubahan nilai R-Square digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen, apakah mempunyai pengaruh substantive. Hasil dari PLS R-Squares mempresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Adapun hasil Warp-PLS mengenai hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Hipotesis Hubungan Langsung

Hipotesis	Hubungan	T-Statistic	P-Value
H1	X1 - Z	7,258	0,001
H2	X2 - Z	1,978	0,048
H3	Z - Y	1,381	0,168
H4	X1 - Y	3,171	0,002
H5	X2 - Y	4,454	0,000
H6	X1 - Z - Y	1,066	0,203
H7	X2 - Z - Y	1,276	0,287

Sumber: Data diolah

Adapun penjelasan dari tabel 2 adalah pajak kendaraan daerah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Z) dengan nilai signifikan (p-value) kurang dari 5%.

H1: Pajak kendaraan daerah berpengaruh terhadap pendatan asli daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah (Z) dengan nilai signifikan (p-value) kurang dari 5%.

H2: Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah (Z) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Y) dengan nilai signifikan (p-value) lebih dari 5%.

H3: Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja

Pajak Kendaraan Bermotor (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) dengan nilai signifikan (p-value) kurang dari 5%.

H4: Pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kinerja.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) dengan nilai signifikan (p-value) kurang dari 5%.

H5: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kinerja

Dari tabel 2 terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh Pajak kendaraan bermotor terhadap Kinerja melalui Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis ke-6 tidak teruji kebenarannya.

H6: Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui pendapatan asli daerah

Sedangkan hipotesis ke-7 tidak teruji kebenarannya yaitu tidak terdapat pengaruh Restribusi Daerah terhadap Kinerja melalui Pendapatan.

H7: Bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui pendapatan asli daerah

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap Z dan besarnya pengaruh variabel X dan Z terhadap Y dapat dilihat dari nilai R-Square. Nilai R-square menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pajak kendaraan bermotor (X1) dan bea balik nama kendaraan bermotor (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Z)

sebesar 30,6%. pajak kendaraan bermotor (X1), bea balik nama kendaraan bermotor (X2) dan pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja (Y) sebesar 59,3%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data pada tahun 2015-2018 yang diperoleh peneliti dari Badan Pendapatan Daerah Prov.Jawa Timur menunjukkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah tahunnya hal tersebut tidak lepas dari beberapa indikator yang menunjang meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meskipun pada perolehan perbulannya. Dengan demikian maka peneliti dalam penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: (1) Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap PAD; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap PAD hal tersebut; (3) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja hal tersebut dapat terlihat bila PAD dikarenakan meski Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan tidak diikuti dengan kinerja yang baik di instansi tersebut; (4) Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kinerja; (5) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kinerja hal tersebut dikarenakan selain dari pajak kendaraan bermotor; (6) Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui PAD hal tersebut dikarenakan dengan semakin tingginya perolehan PAD belum tentu juga meningkatkan kinerja pada instansi tersebut; (7) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap kinerja dengan melalui PAD hal tersebut dikarenakan perolehan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang kecil mengakibatkan tidak berpengaruh terhadap kinerja meskipun melalui variabel intervening PAD dikarenakan seperti yang telah diterangkan pada hipotesis 2.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraanbermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 83–99.
- Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi*, x, 1– 12.
- Azhari Aziz Samudra. (2015). *PERPAJAKAN DI INDONESIA*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, M. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Expedisi di Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*.
- Keuangan, K., Pemerintah, P., Dan, K., Di, K., Sumatera, P., Cherrya, S., Wenny, D., & Mdp, S. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39*, 2(1), 39–51.
- Malayu S.P Hasibuan. (1996). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Edisi Kedu). PT Toko Gunung Agung.
- Maryoto. (2000). *Manajamen Sumber Daya Manusia* (Edisi Keem). BPFPE.
- Pemerintah Daerah. (2010a). *Dasar Pengenakan PKB*.
- Pemerintah Daerah. (2010b). *Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 pasal 18 Pengenakan BBNKB*.
- Pemerintah Daerah. (2010c). *Perda No 9 Pasal 19 pengekanaan biaya dasar BBNKB*.
- Pemerintah Daerah. (2010). *No. 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah*.
- ULFA MARIATI. (2015). *PERANAN STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2014 (Studi Kasus di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timu*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang pasal 33 tentang pertimbangan dan keuangan*.